

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT RUMPUT LAUT

TRIWULAN I TAHUN 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
DIREKTORAT RUMPUT LAUT

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Rumput Laut triwulan I tahun 2026 ini, yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Rumput Laut selama kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2026 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Rumput Laut tahun 2026.

LKj Direktorat Rumput Laut triwulan I tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Rumput Laut, sehingga dapat menjadikan bahan evaluasi serta dapat memberikan umpan balik untuk pencapaian kinerja triwulan berikutnya pada tahun 2026 atau dapat dijadikan pemicu untuk peningkatan kinerja organisasi serta bahan evaluasi melalui langkah-langkah perbaikan pelayanan yang lebih profesional dan transparan bagi masyarakat.

Demikian laporan ini disajikan semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan di masa mendatang.

Jakarta, 17 April 2026
Direktur Rumput Laut,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB 1. PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Tugas dan Fungsi	3
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	4
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya.....	7
1.5.1. Potensi	7
1.5.2. Permasalahan.....	7
1.6. Sistematika Laporan Kinerja (LKj).....	7
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. Sasaran Kegiatan.....	9
2.2. Penetapan Kinerja	9
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026	12
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
3.2. Analisis Kinerja	14
3.2.1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	14
3.2.1.1. Sarana Budi Daya Rumput Laut yang disalurkan ke Masyarakat	14
3.2.1.2. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - ' <i>Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas</i> '	16
3.2.1.3. Kawasan Budi Daya Rumput Laut yang Dibangun dan Direvitalisasi	18
3.2.1.4. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat	21
3.2.1.5. Unit Usaha yang Dilakukan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Rumput Laut.....	23
3.2.1.6. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut.....	25
3.2.2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut	28
3.2.2.1. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Rumput Laut.....	28
3.2.2.2. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Rumput Laut.....	29
3.2.2.3. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Rumput Laut.....	29
3.2.2.4. Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Rumput Laut.....	30
3.2.2.5. Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut.....	31
3.2.2.6. Penyelesaian SOP Direktorat Rumput Laut	32
BAB 4. PENUTUP.....	33
4.1. Kesimpulan	33
4.2. Rekomendasi.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Rumput Laut.....	14
Tabel 3.2. Sarana Budi Daya Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat Triwulan I Tahun 2026	15
Tabel 3.3. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas' Triwulan I Tahun 2026	17
Tabel 3.4. Kawasan Budi Daya Rumput Laut yang Dibangun dan Direvitalisasi Triwulan I Tahun 2026	19
Tabel 3.5. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat Triwulan I Tahun 2026.....	23
Tabel 3.6. Unit Usaha yang Dilakukan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026	24
Tabel 3.7. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026	26
Tabel 3.8. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026	28
Tabel 3.9. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026	29
Tabel 3.10. Indeks Profesional ASN Direktorat Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026	30
Tabel 3.11. Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026	31
Tabel 3.12. Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026	31
Tabel 3.13. Penyelesaian SOP Direktorat Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	4
Gambar 1.2. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawai Direktorat Rumput Laut.....	5
Gambar 1.3. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan ASN di Direktorat Rumput Laut.....	5
Gambar 1.4. Jumlah pegawai berdasarkan Tim Kerja dan Subbagian di Direktorat Rumput Laut	6
Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2026.....	11
Gambar 2.2. NKD Direktorat Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026.....	13

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Rumput Laut triwulan I tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dalam aplikasi Kinerjaku pada triwulan I tahun 2026, Direktorat Rumput Laut mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,20 dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 12 indikator kinerja, dengan capaian seperti tabel berikut.

No	Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW 1 Tahun 2026	Capaian TW 1 Tahun 2026
1	Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	200	-	-
2	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas</i> (Unit)	1	-	-
3	Kawasan budi daya rumput laut yang dibangun dan direvitalisasi (Unit)	1	-	-
4	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat (Kg)	62.231	1.000	3.400
5	Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya rumput laut (Unit)	20	-	-
6	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut (Rekomendasi Kebijakan)	3	-	-
7	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Rumput Laut (Persen)	86	86	92,31
8	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Rumput Laut (Nilai)	84,20	-	-
9	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Rumput Laut (Indeks)	81,50	-	-
10	Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Rumput Laut (Nilai)	81	-	-
11	Layanan Perkantoran (Persen)	100	100	100
12	Penyelesaian SOP Direktorat Rumput Laut (Persen)	100	-	-

Capaian indikator pada triwulan I tahun 2026 seperti pada tabel di atas, menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Rumput Laut sangat baik karena sebanyak 3 (tiga) IKU telah mencapai target, yaitu: (1) Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat; (2) Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Rumput Laut; dan (3) IKU layanan perkantoran.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi biru, serta pelestarian sumber daya dan lingkungan. Pengembangan subsektor perikanan budi daya merupakan bagian strategis dalam upaya transformasi ekonomi nasional yang memerlukan perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien.

Salah satu Kegiatan Prioritas (KP) pada strategi pembangunan perikanan budi daya sesuai dengan RPJMN 2025-2029 yaitu pengembangan hilirisasi rumput laut yang mendukung Prioritas Nasional 5 (PN-5) melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Rumput laut sebagai salah satu komoditas prioritas nasional berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja di wilayah pesisir, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen rumput laut terbesar di dunia. Direktorat Rumput Laut yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki mandat untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan budi daya rumput laut.

Kinerja Direktorat Rumput Laut berperan penting dalam mendukung target pembangunan kelautan dan perikanan nasional, khususnya dalam peningkatan produksi, penguatan sistem usaha, pembinaan pelaku usaha, serta pemanfaatan teknologi budi daya. Penyusunan laporan kinerja dilandaskan pada kerangka regulasi nasional, yaitu UU No.25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan; serta PP No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran negara.

Laporan kinerja Direktorat Rumput Laut triwulan I tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), sekaligus menjadi

instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang dalam dokumen perencanaan tahunan. Melalui laporan ini diharapkan dapat terlihat tingkat pencapaian sasaran strategis, efektivitas pelaksanaan program, serta tantangan dan rekomendasi perbaikan ke depan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja (LKj) Direktorat Rumput Laut triwulan I tahun 2026 ini diantaranya sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Rumput Laut, penyampaian capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan, penyajian data dan informasi sebagai dasar evaluasi kebijakan dan pengambilan Keputusan di periode selanjutnya, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permen KP No.2 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 165, Direktorat Rumput Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Direktorat Rumput Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Rumput Laut.

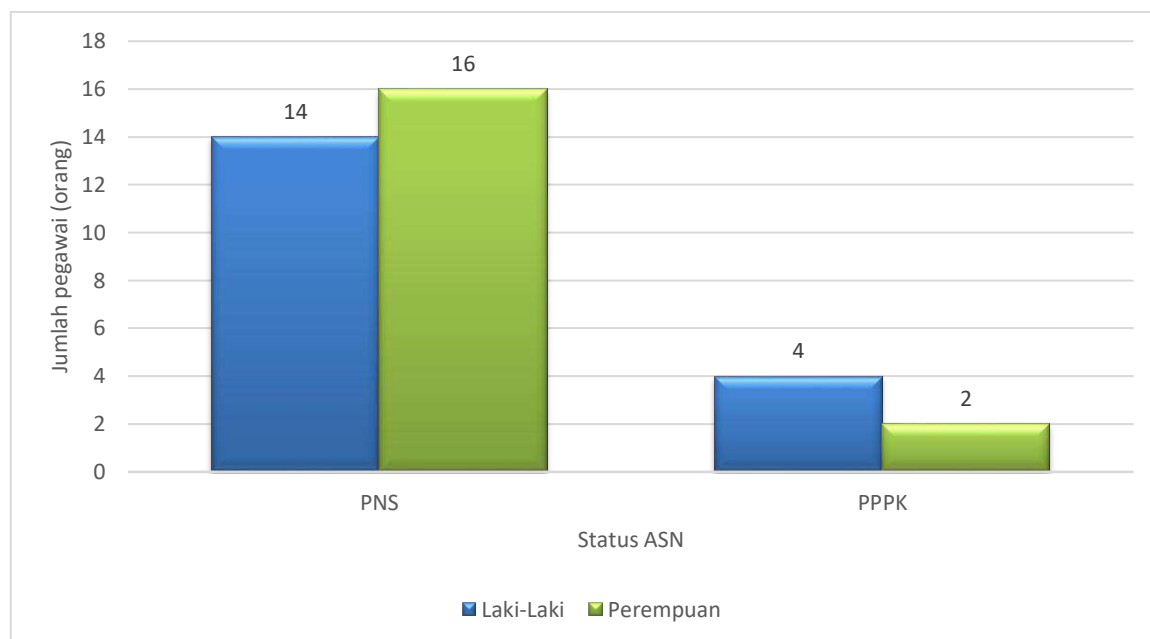
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Direktorat Jenderal Perikanan terdiri atas Sekretariat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Ikan Air Tawar, Direktorat Ikan Air Payau, Direktorat Ikan Air Laut, Direktur Rumput Laut, dan Direktur Prasarana dan Sarana (Gambar 1.1.).



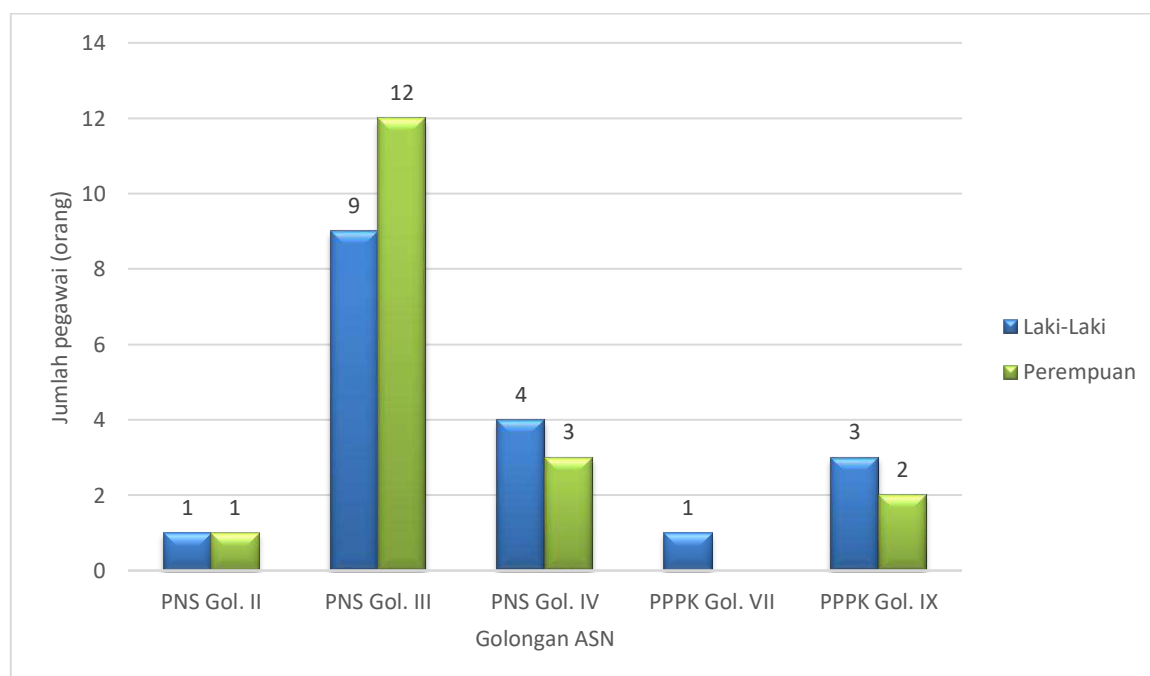
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Direktorat Rumput Laut memiliki jumlah total pegawai yang bertugas sebanyak 36 orang yang dipimpin oleh Direktur Rumput Laut dengan rincian pegawai berdasarkan status kepegawaian tercantum pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawai Direktorat Rumput Laut

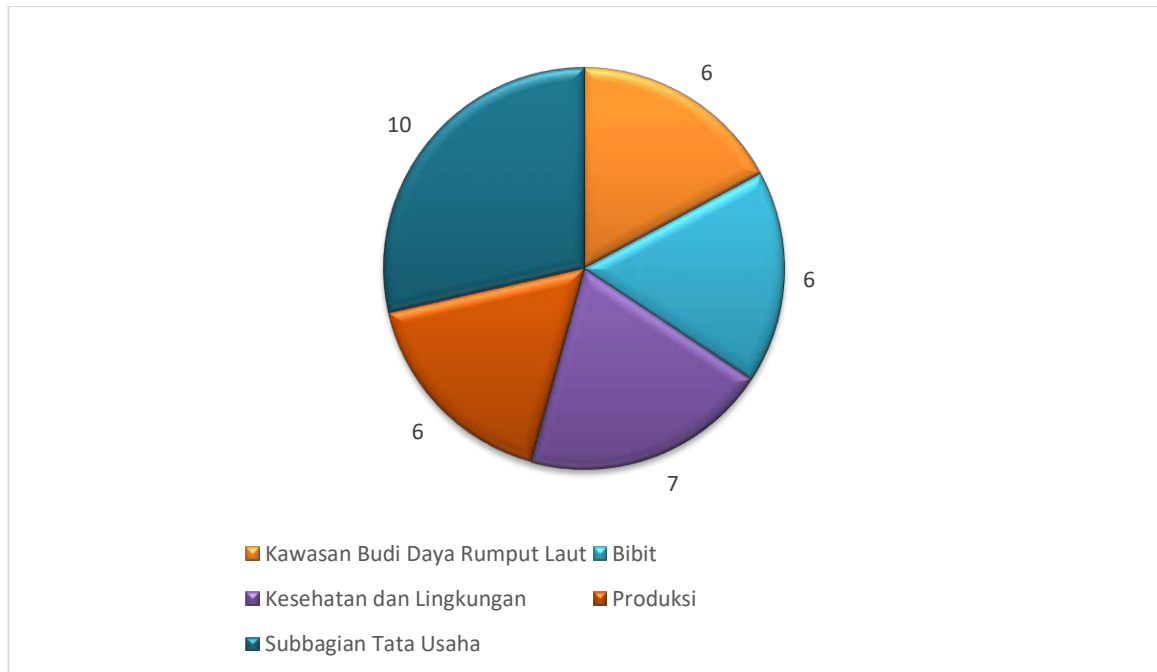
Komposisi pegawai di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki cukup berimbang, mencerminkan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, rincian pegawai berdasarkan golongan PNS dan PPPK tercantum pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan ASN di Direktorat Rumput Laut

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya nomor 161 tahun 2025 tentang ketua tim kerja di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi

Daya dan Surat Tugas Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya nomor B.1039/DJPB/KP.430/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang penugasan pegawai lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, bahwa Direktorat Rumput Laut terdiri atas ketua dan anggota tim kerja, serta ketua dan anggota subbagian, sebagai berikut: (1) Tim kerja kawasan budi daya rumput laut; (2) Tim kerja bibit; (3) Tim kerja kesehatan dan lingkungan; (4) Tim kerja produksi; dan (5) Tim subbagian tata usaha.



Gambar 1.4. Jumlah pegawai berdasarkan Tim Kerja dan Subbagian di Direktorat Rumput Laut

Berdasarkan data di atas, tim kerja dukungan manajemen memiliki jumlah pegawai terbanyak, yaitu 10 orang. Kemudian tim kerja kesehatan ikan memiliki jumlah pegawai sebanyak 7 orang. Tiga tim kerja lainnya yaitu tim kerja kawasan budi daya, tim kerja bibit, dan tim kerja produksi memiliki jumlah pegawai yang sama, masing-masing 6 orang. Secara umum, komposisi pegawai antar tim mengarah pada prinsip efektivitas dan efisiensi organisasi. Selain itu, optimalisasi struktur dan distribusi pegawai berdasarkan kebutuhan operasional masing-masing tim kerja.

Direktorat Rumput Laut terus mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme pegawai melalui pelatihan teknis, pengembangan kompetensi ASN, serta peningkatan nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

1.5.1. Potensi

Pembangunan perikanan budi daya di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional. Salah satu komoditas prioritas adalah rumput laut, dimana Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia untuk jenis *Kappaphycus alvarezii*. Selain itu, jenis rumput laut lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan yaitu *Gracilaria*, *Ulva*, dsb.

Potensi rumput laut tidak hanya terbatas pada sektor pangan dan bahan baku industri kosmetik maupun farmasi, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung substitusi impor bahan baku industri berbasis bioteknologi. Wilayah pesisir Indonesia sangat cocok untuk budi daya rumput laut karena kondisi perairannya yang optimal, suhu stabil, dan tersedianya kawasan yang relatif luas, namun belum dimanfaatkan secara optimal.

1.5.2. Permasalahan

Di sisi lain, pengembangan budi daya rumput laut juga menghadapi berbagai permasalahan. Masalah utama bibit rumput laut di Indonesia adalah ketergantungan pada bibit hasil perbanyakan vegetatif, yaitu potongan tanaman yang diambil berulang kali dari induk yang sama, hal ini yang menyebabkan menurunnya kualitas genetik bibit. Selain itu, keterbatasan teknologi budi daya yang ramah lingkungan, masih rendahnya akses terhadap teknologi pascapanen dan pemasaran turut membatasi nilai tambah yang dapat dihasilkan, serta fluktuasi harga pasar yang tidak stabil, kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim, pencemaran laut, dan serangan hama dan penyakit yang dapat menurunkan hasil panen. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, peneliti, masyarakat, pembudi daya, dan *stakeholder* lainnya agar potensi budi daya rumput laut dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

1.6. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Laporan kinerja (LKJ) ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Direktorat Rumput Laut triwulan I tahun 2026. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Direktorat Rumput Laut, LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) triwulan I tahun 2026 dengan target kinerja

pada tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*), sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di periode berikutnya. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Rumput Laut pada periode triwulan I tahun 2026.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Rumput Laut termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan kinerja.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini disajikan sasaran kegiatan, gambaran singkat mengenai penetapan kinerja, serta pengukuran capaian kinerja Direktorat Rumput Laut triwulan I tahun 2026.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Rumput Laut serta evaluasi dan analisis kinerja triwulan I tahun 2026. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Direktorat Rumput Laut memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu: (1) Terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut; dan (2) Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Rumput laut.

Pada sasaran kegiatan terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut, terdiri atas 6 (enam) indikator kinerja utama (IKU), yaitu:

1. Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat;
2. Infrastruktur kawasan budi daya rumput laut – *‘Ocean for prosperity – infrastructure for coral reef areas’*;
3. Kawasan budi daya rumput laut yang dibangun dan direvitalisasi;
4. Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat;
5. Unit usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya rumput laut; dan
6. Kebijakan tata kelola bidang budi daya rumput laut.

Sasaran kegiatan terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Rumput laut, terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja manajerial (IKM), antara lain:

1. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Rumput Laut;
2. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Rumput Laut;
3. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Rumput Laut;
4. Pengawasan kearsipan internal Direktorat Rumput Laut;
5. Layanan perkantoran; dan
6. Penyelesaian SOP Direktorat Rumput Laut.

2.2. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, serta kebijakan pembangunan budi daya nasional.

Direktorat Rumput Laut sebagai salah satu unit eselon II di bawah naungan Ditjen Perikanan Budi Daya memiliki peran dalam peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan subsektor rumput laut di Indonesia. Oleh karena itu, penetapan perjanjian kinerja Direktorat Rumput Laut tahun 2026 disusun dengan pendekatan SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound*) untuk menjamin bahwa setiap target yang ditetapkan bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Adapun indikator kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 2.1.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT RUMPUT LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nono Hartanto**
Jabatan : Direktur Rumput Laut
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT RUMPUT LAUT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	1. Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	200
	2. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas (Unit)	1
	3. Kawasan budi daya rumput laut yang dibangun dan direvitalisasi (Unit)	1
	4. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat (Kg)	62.231
	5. Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya rumput laut (Unit)	20
	6. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut (Rekomendasi Kebijakan)	3
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut	7. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Rumput Laut (Persen)	86
	8. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Rumput Laut (Nilai)	84,20
	9. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Rumput Laut (Indeks)	81,50
	10. Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Rumput Laut (Nilai)	81
	11. Layanan Perkantoran (Persen)	100
	12. Penyelesaian SOP Direktorat Rumput Laut (Persen)	100

DATA ANGGARAN:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	24.041.672.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Rumput Laut	198.717.000
Total Anggaran Direktorat Rumput Laut Tahun 2026		24.240.389.000

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2026

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Rumput Laut dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Rumput Laut dengan data pencapaian kinerjanya. Metode pengukuran kinerja berpedoman pada manual indikator kinerja atau manual IKU. Data yang dimasukan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh Tim Kinerja, sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat yakni dari unit kerja pemilik kegiatan.

Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Rumput Laut triwulan I tahun 2026 menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/ semesteran/ tahunan).
2. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi kinerjaku.kkp.go.id;
3. Status capaian indikator kinerja utama (IKU) yang ada dalam aplikasi kinerjaku.kkp.go.id ditunjukkan dengan warna:
 - a. Biru (untuk indikator dengan rentang nilai 110-120 atau Istimewa);
 - b. Hijau (untuk indikator dengan rentang nilai 90-<110 atau baik);
 - c. Kuning (untuk indikator dengan rentang nilai 70-<90 atau cukup);
 - d. Merah (untuk indikator dengan rentang nilai 50-<70 atau kurang);
 - e. Hitam (untuk indikator dengan rentang nilai <50 atau sangat kurang); dan
 - f. Abu-abu (untuk indikator yang belum ada penilaian).

Pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*.

1. *Maximize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.

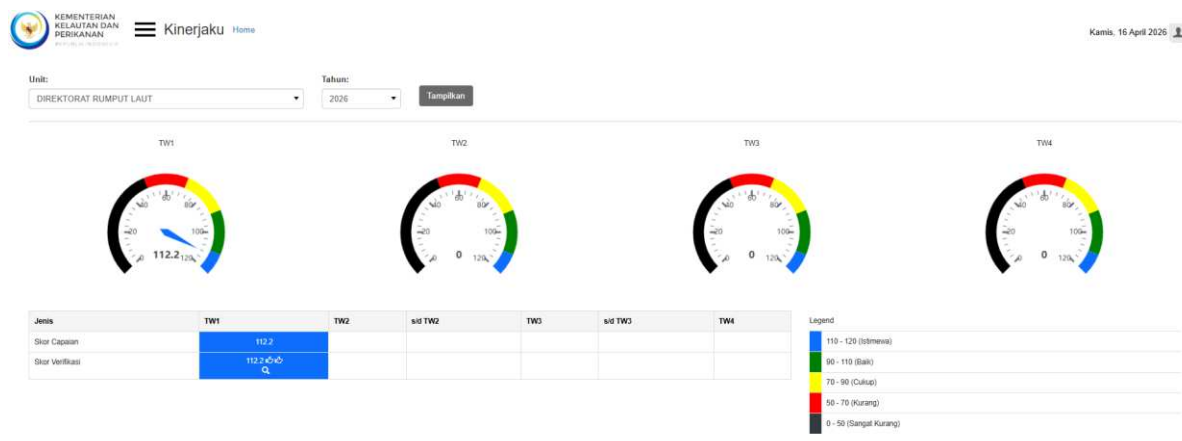
2. *Minimize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik.

3. *Stabilize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan penerapan Aplikasi "Kinerjaku", capaian NKO Direktorat Rumput Laut triwulan I tahun 2026 sebesar 112,20 seperti terlihat dalam gambar 2.2.



Gambar 2.2. NKO Direktorat Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas capaian organisasi Direktorat Rumput Laut, yang menjadi indikator utama sebanyak 6 indikator kinerja utama dan 6 indikator kinerja manajerial dengan rincian seperti disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Rumput Laut

No	Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW 1 Tahun 2026	Capaian TW 1 Tahun 2026
1	Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	200	-	-
2	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas</i> (Unit)	1	-	-
3	Kawasan budi daya rumput laut yang dibangun dan direvitalisasi (Unit)	1	-	-
4	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat (Kg)	62.231	1.000	3.400
5	Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya rumput laut (Unit)	20	-	-
6	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut (Rekomendasi Kebijakan)	3	-	-
7	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Rumput Laut (Persen)	86	86	92,31
8	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Rumput Laut (Nilai)	84,20	-	-
9	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Rumput Laut (Indeks)	81,50	-	-
10	Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Rumput Laut (Nilai)	81	-	-
11	Layanan Perkantoran (Persen)	100	100	100
12	Penyelesaian SOP Direktorat Rumput Laut (Persen)	100	-	-

3.2. Analisis Kinerja

3.2.1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut

3.2.1.1. Sarana Budi Daya Rumput Laut yang disalurkan ke Masyarakat

Rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan subsektor perikanan budi daya yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Komoditas ini memiliki nilai ekonomi tinggi, permintaan pasar

yang terus meningkat serta proses budi daya yang relatif sederhana. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pembudi daya rumput laut, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana produksi seperti tali, pelampung, jangkar, bibit berkualitas, serta peralatan pendukung lainnya. Keterbatasan tersebut menyebabkan produktivitas dan kualitas hasil budi daya belum optimal.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan kegiatan bantuan sarana budi daya rumput laut kepada masyarakat pembudi daya. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha budi daya, mempercepat pemulihan sarana yang rusak, serta meningkatkan efisiensi kegiatan produksi. Melalui dukungan sarana yang memadai, pembudi daya diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, menjaga kontinuitas produksi serta meningkatkan daya saing produk rumput laut. Sebagai bagian dari pelaksanaan program, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menetapkan target penyaluran bantuan sarana budi daya rumput laut kepada kelompok masyarakat pembudi daya yang memenuhi kriteria.

Penghitungan indikator kinerja ini yaitu jumlah bantuan sarana budi daya rumput laut yang disalurkan kepada masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan program bantuan sarana budi daya rumput laut adalah untuk mendukung kegiatan pembudidayaan rumput laut melalui penyediaan sarana produksi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan budi daya. Indikator keberhasilannya adalah tersalurkannya bantuan pemerintah sarana dan prasarana budi daya rumput laut tahun anggaran 2026. Sedangkan sasaran kegiatan ini adalah pembudi daya rumput laut yang memenuhi persyaratan.

Tabel 3.2. Sarana Budi Daya Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut									
IKU: Sarana Budi Daya Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat									
Tahun 2025		Tahun 2026			% Capaian		% perbandingan dengan TW I Tahun 2025	Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi		Target (Unit)		Realisasi TW 1 (unit)	Terhadap target TW 1 tahun 2026	Terhadap target tahun 2026		Target 2026	% Capaian 2026
TW I	Tahun 2025	Tahun 2026	TW 1						
N/A	N/A	200	-	-	-	-	-	200	-

Perencanaan jumlah bantuan sarana budi daya rumput laut yang akan disalurkan ke masyarakat di tahun ini sebanyak 200 unit. Pada triwulan I belum ada

realisasi penyaluran bantuan sarana budi daya rumput laut. Penyebab belum terealisasinya penyaluran bantuan sarana budi daya rumput laut pada triwulan I, antara lain: (1) Proses penetapan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) masih dalam tahap verifikasi dan validasi; (2) Tahapan pengadaan barang/jasa masih berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (3) Perlunya penyesuaian spesifikasi teknis bantuan dengan kondisi lokasi penerima; (4) Jadwal distribusi direncanakan pada triwulan II setelah seluruh proses administrasi dan pengadaan selesai; dan (5) Koordinasi dengan pemerintah daerah dan kelompok penerima masih dalam tahap finalisasi. Meskipun realisasi kegiatan penyaluran sarana budi daya rumput laut belum terlaksana, upaya percepatan pelaksanaan terus dilakukan agar target bantuan sebanyak 200 unit dapat tercapai di tahun anggaran 2026.

Perhitungan realisasi bantuan sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat adalah jumlah bantuan sarana budi daya rumput laut yang telah disalurkan, sehingga total capaian yang diperoleh yaitu 0 % dari target tahun 2026. Pagu anggaran kegiatan bantuan sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp. 9.586.460.000,- dengan realisasi anggaran triwulan I sebesar Rp. 118.772.219,- atau 1,24% dari pagu anggaran. Realisasi anggaran tersebut digunakan dalam rangka koordinasi, identifikasi, dan verifikasi bantuan sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat.

Rencana tindak lanjut triwulan II tahun 2026, yaitu: (1) Percepatan proses verifikasi dan validasi calon penerima dan calon lokasi (CPCL); (2) Percepatan proses pengadaan sarana budidaya rumput laut; (3) Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kelompok penerima bantuan; (4) Penyusunan jadwal distribusi dan penyaluran bantuan secara bertahap; dan (5) Monitoring kesiapan lokasi penerima bantuan.

3.2.1.2. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas'

Program *Oceans for Prosperity Project* - LAUTRA atau Program Lautan Sejahtera bertujuan untuk memperkuat ketahanan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui peningkatan pengelolaan Kawasan Konservasi laut termasuk ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove serta mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan. Program ini juga mendorong pengembangan

peluang ekonomi masyarakat lokal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor perikanan, pariwisata, termasuk perikanan budi daya yang berkelanjutan.

Kegiatan komponen 2 LAUTRA dilakukan antara lain dalam hal pendekatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan yaitu melalui kegiatan: (1) Fasilitasi pembangunan dan penguatan infrastruktur publik desa sesuai dengan daya dukung kawasan konservasi; (2) Penyediaan prasarana sarana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal; (3) Penguatan kelembagaan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah/UPT. Penguatan sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dari Komponen 2, yang tidak hanya akan dikelola oleh lembaga usaha masyarakat dan pemerintah desa, tetapi juga oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta pemerintah kabupaten/kota pesisir. Kolaborasi lintas pihak ini bertujuan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia benar-benar mendukung pengembangan usaha masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Permasalahan utama dalam budi daya rumput laut terkait bibit adalah ketersediaan bibit berkualitas rendah dan terbatasnya bibit unggul hasil kultur jaringan. Pembudi daya sering menggunakan bibit dari hasil budi daya sebelumnya, yang rentan terhadap penyakit dan penurunan kualitas. Selain itu, ada juga masalah ketergantungan pada bibit alami dan kurangnya pemahaman tentang teknik kultur jaringan.

Pengembangan bibit rumput laut melalui kultur jaringan dapat menghasilkan bibit unggul dengan pertumbuhan dan ketahanan yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, melalui program LAUTRA Komponen 2 akan dilaksanakan kegiatan pengembangan laboratorium kultur jaringan dan sarana budi daya rumput laut di UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk mendukung peremajaan bibit rumput laut serta pengembangan kawasan budi daya rumput laut di lokasi LAUTRA.

Tabel 3.3. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas' Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut										
IKU: Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas'										
Tahun 2025		Tahun 2026			% Capaian		%	Renstra DJPB 2025-2029		
Realisasi		Target (Unit)		Realisasi TW 1 (unit)	Terhadap target TW 1 tahun 2026	Terhadap target tahun 2026		perbandingan dengan TW I Tahun 2025	Target 2026	% Capaian 2026
TW I	Tahun 2025	Tahun 2026	TW 1							
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	

Pada tahun 2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - *Oceans for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas* memiliki target 1 (satu) unit dengan alokasi anggaran LAUTRA untuk Komponen 2 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan blokir anggaran sebesar Rp.1.640.400.000,- sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp.3.359.600.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 41,584,442,- atau 1,24% dari pagu. Realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I adalah: (1) Perencanaan rehabilitasi laboratorium kultur jaringan rumput laut di BPBL Lombok; (2) Proses pendaftaran *procurement plan* STEP untuk *Detailed Engineering Design* (DED); (3) Identifikasi lokasi untuk kegiatan kawasan budi daya rumput laut di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat; dan (4) Identifikasi lokasi untuk kegiatan distribusi bibit rumput laut kultur jaringan di Nusa Tenggara Timur.

Kendala masih rendahnya penyerapan anggaran dan belum terlaksananya kegiatan adalah karena masih menunggu selesainya proses *framework agreement* pada sistem pengadaan konsultan dan konstruksi.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada triwulan II adalah melakukan koordinasi lebih lanjut dengan mitra untuk percepatan proses pengadaan barang/jasa. Selain itu, akan dilakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan yang berada di lokasi Lautra untuk melakukan identifikasi dan verifikasi potensi budi daya rumput laut di lokasi tersebut sebagai sasaran lokasi kegiatan pengembangan kawasan budi daya rumput laut dan distribusi bantuan bibit rumput laut.

3.2.1.3. Kawasan Budi Daya Rumput Laut yang Dibangun dan Direvitalisasi

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, Direktorat Rumput Laut melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas rumput laut. Komoditas ini ditetapkan sebagai salah satu komoditas unggulan nasional mengingat potensi sumber daya yang besar serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Indonesia merupakan salah satu produsen utama rumput laut dunia dengan potensi lahan budi daya mencapai ±12,1 juta hektar. Potensi tersebut menjadi

landasan strategis dalam mendorong pengembangan industri berbasis rumput laut melalui pendekatan hilirisasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Untuk mendukung peningkatan jumlah produksi rumput laut, Direktorat Rumput Laut akan membangun kawasan budi daya rumput laut pada sentra budi daya rumput laut di Indonesia. Dalam satu kawasan akan terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga akan memudahkan dalam sistem logistik. Bagian hulu akan dibangun kebun bibit rumput laut dan unit produksi budi daya rumput laut. Selain itu, diberikan prasarana pendukung lainnya seperti perahu pemeliharaan, perahu panen, para-para dan rumah ikat. Rencana luasan yang akan dibangun dalam kawasan ini adalah 50 hektar.

Sinergi dengan institusi terkait lain harus dilakukan, diantaranya dengan pemerintah daerah setempat dan unit eselon I lain lingkup KKP maupun Kementerian/Lembaga lainnya. Pada tahun 2026 direncanakan akan dibangun kawasan budi daya rumput laut di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah pemberian bantuan kebun bibit rumput laut, rumah ikat, bibit rumput laut, budi daya pembesaran, dan perahu pemeliharaan.

Tabel 3.4. Kawasan Budi Daya Rumput Laut yang Dibangun dan Direvitalisasi Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut									
IKU: Kawasan Budi Daya Rumput Laut yang Dibangun dan Direvitalisasi									
Tahun 2025		Tahun 2026			% Capaian		% perbandingan dengan TW I Tahun 2025	Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi		Target (Unit)		Realisasi TW 1 (unit)	Terhadap target TW 1 tahun 2026	Terhadap target tahun 2026		Target 2026	% Capaian 2026
TW I	Tahun 2025	Tahun 2026	TW 1						
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Progres kegiatan pembangunan kawasan budi daya rumput laut di Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, pada triwulan I tahun 2026 diantaranya adalah penyusunan dokumen-dokumen pendukung kegiatan dan penyusunan dokumen perencanaan studi kelayakan modeling budi daya rumput laut. Adapun dokumen yang telah disusun antara lain:

1. Penetapan lokasi modeling rumput laut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 35 Tahun 2026 tentang lokasi modeling rumput laut di Kabupaten Jepara pada tanggal 2 Februari 2026;
2. Penyusunan revisi petunjuk teknis bantuan pemerintah modeling budi daya rumput laut tahun anggaran 2026;

3. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Rumput Laut Nomor 911/SK/DRL/II/2026 tentang tim teknis modeling budi daya rumput laut di Kabupaten Jepara tahun anggaran 2026 pada tanggal 6 Februari 2026;
4. Penetapan lokasi modeling berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor 500.5.5.10/81 Tahun 2026 tentang penetapan lokasi modeling budi daya rumput laut tahun 2026 tanggal 11 Maret 2026;
5. Nota Kesepakatan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dengan Bupati Jepara; dan
6. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Rumput Laut Nomor 1674/SK/DRL/III/2026 tentang penerima bantuan pemerintah sarana unit budi daya rumput laut di Kabupaten Jepara tahun anggaran 2026 pada tanggal 25 Maret 2026.

Penyusunan dokumen studi kelayakan penting dilakukan untuk mengkaji kelayakan secara komprehensif potensi dan prospek rencana pengembangan kawasan budi daya rumput laut di Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Selain itu, penyusunan dokumen ini menjadi penting sebagai landasan perencanaan pengembangan kawasan, penentuan skala dan tahapan kegiatan, serta penyusunan kebijakan dan program pengembangan budi daya rumput laut yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Ruang lingkup dalam penyusunan studi kelayakan kawasan budi daya rumput laut Kabupaten Jepara tahun anggaran 2026 antara lain persiapan dan perencanaan kegiatan, pengumpulan data, analisis aspek teknis, analisis aspek finansial dan ekonomi, analisis aspek lingkungan dan sosial, analisis risiko dan mitigasi, penyusunan rekomendasi dan dokumen akhir.

Lokasi studi kelayakan difokuskan di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara yang terletak di pulau utama Kepulauan Karimunjawa dan merupakan salah satu kawasan pesisir yang strategis untuk pengembangan budi daya laut, khususnya rumput laut. Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek teknis, sosial ekonomi, kelembagaan, serta dukungan kebijakan, pengembangan usaha budi daya rumput laut di Desa Kemujan, wilayah Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dapat dinyatakan layak untuk dikembangkan.

Setelah dilaksanakan penyusunan studi kelayakan, saat ini sedang dilakukan penyusunan dokumen master plan. Master plan disusun akan memuat analisis kondisi eksisting, potensi dan permasalahan serta arahan pengembangan budi daya

rumput laut yang berkelanjutan. Selain itu, output yang diharapkan terdapat pada dokumen tersebut antara lain peta kesesuaian dan arahan lokasi budi daya rumput laut yang disusun secara spasial dan selaras dengan rencana tata ruang wilayah pesisir, rekomendasi pengembangan sarana dan prasarana pendukung budi daya rumput laut, rencana program dan tahapan pengembangan budi daya rumput laut jangka pendek, menengah dan panjang, serta laporan akhir pekerjaan akhir jasa konsultan beserta dokumen pendukung dalam bentuk cetak dan digital.

Pagu anggaran kegiatan kawasan budi daya rumput laut yang dibangun dan direvitalisasi sebesar Rp. 9.221.600.000. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan 1 sebesar Rp. 214.460.180, atau sebesar 2,33% dari total pagu anggaran.

Kendala yang dihadapi, yaitu: (1) Belum disepakatinya penggunaan pemberat yang diusulkan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa karena sedang menunggu keputusan final dari Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan; (2) Masyarakat pembudi daya belum terlalu mengenal atau paham sarana budi daya rumput laut yang akan digunakan dalam kegiatan modeling budi daya rumput laut; dan (3) Rencana produk sarana budi daya yang digunakan masih dalam tahap uji coba.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan II yaitu akan diadakan pertemuan antara Bupati Jepara, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa, dan Direktur Rumput Laut dengan Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan terkait rencana kegiatan modeling budi daya rumput laut dan pembahasan teknis pemberat yang akan digunakan. Rencana kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pembudi daya sedang disusun dengan mengundang pakar atau ahli pada bidang teknis dan produk sarana budi daya rumput laut yang akan digunakan. Selain itu, proses uji coba sarana budi daya yang sedang dilaksanakan oleh BPBL Lombok akan segera diketahui hasilnya setelah 1 (satu) siklus.

3.2.1.4. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat

Rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan dan prioritas andalan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program bantuan bibit rumput laut kultur jaringan menjadi program yang dilaksanakan guna mendukung peningkatan produksi

rumput laut nasional. Selain itu, program bantuan bibit rumput laut kultur jaringan juga dapat meningkatkan kualitas rumput laut di masyarakat. Program bantuan ini dilatarbelakangi bahwa saat ini masyarakat masih menggunakan sumber bibit lokal yang merupakan bibit dengan generasi cukup lama, sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas dan hasil produksi. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan bibit rumput laut yang berkualitas, tahan penyakit, cepat tumbuh dan selalu tersedia sepanjang musim. Oleh karena itu, kebutuhan bibit yang berkualitas sangat dibutuhkan pembudi daya, diantaranya dilakukan melalui teknologi kultur jaringan pada penyediaan bibit rumput laut. Bibit rumput laut hasil kultur jaringan ini memiliki keunggulan yaitu tumbuh lebih cepat dan memiliki ketahanan terhadap penyakit yang lebih tinggi. Bibit rumput laut kultur jaringan diproduksi di laboratorium dengan menghasilkan planlet yang merupakan individu baru hasil kultur jaringan.

Program bantuan ini dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. DJPB melalui unit pelaksana teknisnya telah mengembangkan bibit rumput laut kultur jaringan yang memiliki daya tahan terhadap kondisi lingkungan yang lebih baik serta laju pertumbuhan yang relatif cepat. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan dilaksanakan di laboratorium kultur jaringan rumput laut di 6 (enam) UPT DJPB yaitu BBPBL Lampung, BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BPBAP Takalar, BPBL Lombok, dan BPBL Ambon. Diharapkan melalui produksi bibit rumput laut kultur jaringan yang telah diproduksi dari UPT akan dapat menyediakan bibit rumput laut yang berkualitas bagi pembudidaya rumput laut.

Penghitungan indikator kinerja ini yaitu jumlah bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan program bantuan bibit rumput laut kultur jaringan adalah menstimulus kegiatan pembudidayaan rumput laut dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budi daya. Sedangkan sasaran kegiatan ini adalah pembudi daya rumput laut yang memenuhi persyaratan.

Perencanaan jumlah bibit yang akan disalurkan ke masyarakat di tahun ini sebanyak 62.231 kg. Kelompok penerima bantuan bibit rumput laut yang telah menerima bantuan bibit berlokasi di Kab Batam (2.400 Kg) dan Kab. Takalar (1.000 Kg).

Tabel 3.5. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut									
IKU: Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat									
Tahun 2025		Tahun 2026			% Capaian		% perbandingan dengan TW I Tahun 2025	Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi (Kg)		Target (Kg)		Realisasi TW 1 (unit)	Terhadap target TW 1 tahun 2026	Terhadap target tahun 2026		Target 2026 (Kg)	% Capaian 2026
TW I	Tahun 2025	Tahun 2026	TW 1						
2.520	16.850	62.231	1.000	3.400	340%	5,46%	134,92%	62.231	5,46%

Perhitungan realisasi bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat adalah jumlah bantuan bibit rumput laut yang disalurkan, sehingga total capaian yang diperoleh yaitu 3.400 Kg atau 5,46 % dari target tahun 2026.

Pagu anggaran kegiatan bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp. 2.998.306.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 101.572.422,- atau 3,38%.

Rencana tindak lanjut triwulan II tahun 2026, antara lain: (1) Peningkatan produksi planlet, dan juga mikropopagul dan kalus yang merupakan tahapan-tahapan sebelum planlet; (2) Percepatan CPCL; dan (3) Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan UPT.

3.2.1.5. Unit Usaha yang Dilakukan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Rumput Laut

Usaha budi daya rumput laut merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan perikanan budi daya yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, baik domestik maupun internasional, terhadap produk rumput laut yang berkualitas dan aman, maka diperlukan upaya peningkatan standar mutu melalui penerapan sistem sertifikasi.

Sertifikasi dalam perikanan budi daya, seperti Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), menjadi instrumen penting dalam menjamin bahwa proses produksi telah memenuhi persyaratan teknis, keamanan pangan, sosial ekonomi serta keberlanjutan lingkungan. Unit usaha yang telah tersertifikasi diharapkan mampu menghasilkan produk yang berkualitas, memiliki daya saing tinggi, serta memenuhi standar pasar.

Namun demikian, sebagian besar unit usaha budi daya rumput laut masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapan standar sertifikasi. Permasalahan

tersebut antara lain keterbatasan pemahaman terhadap persyaratan CBIB, kurangnya pencatatan kegiatan usaha, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya penerapan prinsip biosekuriti dan pengelolaan lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pembinaan secara berkelanjutan terhadap unit usaha budi daya rumput laut guna meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial pembudi daya dalam memenuhi standar sertifikasi. Pembinaan ini meliputi sosialisasi, pendampingan teknis, fasilitasi pemenuhan persyaratan, hingga evaluasi kesiapan unit usaha dalam memperoleh sertifikat.

Adapun pengaturan tentang kewenangan pembinaan dan pengendalian dalam rangka penerbitan sertifikat diatur dalam Permen KP No. 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pelaksanaan pembinaan penerapan CBIB diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 463 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Penerapan Mutu Pembudidayaan Ikan. Berdasarkan Kepdirjen tersebut, pembinaan CBIB dilaksanakan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi.

Tabel 3.6. Unit Usaha yang Dilakukan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut									
IKU: Unit Usaha yang Dilakukan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Rumput Laut									
Tahun 2025		Tahun 2026			% Capaian		% perbandingan dengan TW I Tahun 2025	Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi (Unit)		Target (Unit)		Realisasi TW 1 (Unit)	Terhadap target TW 1 tahun 2026	Terhadap target tahun 2026		Target 2026 (Unit)	% Capaian 2026
TW I	Tahun 2025	Tahun 2026	TW 1						
-	378	20	-	-	-	-	-	20	-

Pengukuran indikator kinerja yaitu jumlah unit usaha budi daya rumput laut yang telah dilakukan pembinaan CBIB oleh Direktorat Rumput Laut. Pengukuran IKU dilaksanakan di akhir tahun, namun perkembangan kegiatan dilaporkan setiap triwulan. Pada tahun 2026, target unit budi daya rumput laut yang dibina penerapan sertifikasi perikanan budi daya (CBIB) oleh Direktorat Rumput Laut sebanyak 20 unit pembudi daya rumput laut dengan dukungan anggaran sebesar Rp16.000.000,-

Pelaksanaan kegiatan pada triwulan I berfokus pada identifikasi dan pendataan pembudi daya rumput laut yang merupakan langkah awal dalam memastikan sasaran kegiatan pembinaan penerapan sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB). Pendataan dilaksanakan dengan berkoordinasi melalui surat Direktur Rumput Laut Nomor B.70/DJPB.5.PB.430/I/2023 tanggal 30 Januari 2026 hal

Permohonan Data Pembudidaya Rumput Laut dan Balai Benih Ikan/Unit Pelaksana Teknis Daerah (BBI/UPTD) yang dikirim ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi pada sentra budi daya rumput laut. Cara ini dinilai efektif untuk menjangkau sentra-sentra produksi utama, sekaligus memanfaatkan basis data yang telah tersedia di daerah dengan kondisi keterbatasan anggaran saat ini.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dalam tahap ini. Pertama, kualitas dan kelengkapan data yang disampaikan oleh daerah memiliki potensi perbedaan pemahaman, keterkinian data, dan validitas informasi dapat menjadi tantangan apabila tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut. Kedua, dengan alokasi anggaran yang relatif terbatas, diperlukan strategi pemanfaatan sumber daya yang efisien dan tepat guna, terutama untuk mendukung kegiatan pembinaan sertifikasi CBIB yang rencana akan dilaksanakan pada triwulan IV. Rentang waktu pelaksanaan yang direncanakan pada triwulan IV berpotensi menimbulkan risiko keterlambatan apabila persiapan tidak dilaksanakan secara matang sejak triwulan II. Oleh karena itu, kesinambungan antara tahap identifikasi, persiapan, hingga pelaksanaan perlu dilaksanakan agar kegiatan pembinaan dapat dilaksanakan dengan baik.

Rencana tindak lanjut triwulan II tahun 2026, adalah: (1) Melanjutkan identifikasi dan pendataan pembudidaya rumput laut di Indonesia; (2) Berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk mendukung kegiatan tersebut dengan menyiapkan data yang dibutuhkan; (3) Berkoordinasi dengan penyuluh perikanan untuk dapat mengawal pembudi daya yang akan melaksanakan pembinaan CBIB; dan (4) Pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dilaksanakan secara daring (*online*).

3.2.1.6. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut

Budi daya rumput laut merupakan salah satu subsektor unggulan dalam pembangunan perikanan budi daya yang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan ekspor, serta penyerapan tenaga kerja di wilayah pesisir. Indonesia sebagai salah satu produsen utama rumput laut dunia memiliki keunggulan komparatif dari sisi sumber daya alam, luas wilayah perairan, serta kondisi lingkungan yang mendukung.

Namun demikian, pengelolaan budi daya rumput laut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya penataan ruang dan pemanfaatan

lahan budi daya, ketidakterpaduan data dan informasi, rendahnya penerapan standar mutu dan keberlanjutan, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, fluktuasi produksi dan kualitas hasil budi daya juga menjadi kendala dalam memenuhi permintaan pasar yang semakin menuntut standar tinggi.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, diperlukan kebijakan tata kelola yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan di bidang budi daya rumput laut. Kebijakan ini mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan ruang, sistem produksi, jaminan mutu, penguatan kelembagaan, serta dukungan sarana dan prasarana. Tata kelola yang baik diharapkan mampu menciptakan sistem usaha budi daya yang efisien, produktif, ramah lingkungan, serta berdaya saing.

Kegiatan penyusunan dan implementasi kebijakan tata kelola ini menjadi penting sebagai upaya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui kebijakan yang jelas dan terarah, diharapkan pengembangan budi daya rumput laut dapat dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Indikator kinerja ini adalah kebijakan tata kelola bidang budi daya rumput laut atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). NSPK yaitu petunjuk atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan, sehingga NSPK merupakan suatu petunjuk atau pedoman untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan NSPK.

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan kegiatan penyusunan NSPK. Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan NSPK. Standar adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan kegiatan penyusunan NSPK. Sedangkan kriteria merupakan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan penyusunan NSPK. NSPK menjadi penting, karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyusunan NSPK. Beberapa penyusunan NSPK yang direncanakan pada tahun 2026.

Tabel 3.7. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut									
IKU: Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut									
Tahun 2025		Tahun 2026			% Capaian		% perbandingan dengan TW I Tahun 2025	Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi (Rekomendasi Kebijakan)		Target (Rekomendasi Kebijakan)		Realisasi TW 1 (Rekomen dari Kebijakan)	Terhadap target TW 1 tahun 2026	Terhadap target tahun 2026		Target 2026 (Rekomen dari Kebijakan)	% Capaian 2026
TW I	Tahun 2025	Tahun 2026	TW 1						
-	9	3	-	-	-	-	-	3	-

Indikator kinerja ini mengukur jumlah dokumen rekomendasi kebijakan berupa penerbitan NSPK atau kebijakan-kebijakan lain terkait bidang budi daya rumput laut dengan target pada tahun 2026 sebanyak 3 rekomendasi kebijakan dan anggaran sebesar Rp. 217.612.000,-

Adapun pada realisasi pada triwulan I kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan penyusunan SOP standardisasi bidang perbenihan atau pembibitan rumput laut sebanyak 5 dokumen dengan judul:
 - i. Perencanaan penyusunan standardisasi teknis di bidang pembibitan rumput laut;
 - ii. Pengajuan Usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS);
 - iii. Pengajuan Usulan Anggota Komite Teknis Perikanan Budi Daya;
 - iv. Rapat Teknis Bidang Pembudidayaan Rumput Laut; dan
 - v. Rapat Konsensus Bidang Pembudidayaan Rumput Laut.
- b. Telah dilaksanakan rapat konseptor untuk 4 (empat) judul RSNi yang siap untuk dilakukan pembahasan pada rapat teknis, yaitu:
 - i. Produksi bibit rumput laut *Gracilaria* (*Gracilaria* spp.) dengan spora dengan konseptor Khairil Jamal, S.Pi., M.Si. (BPBAP Takalar);
 - ii. Rumput laut *kotoni* (*Kappaphycus alvarezii*) hasil kultur jaringan – Bagian 3: Pembesaran planlet dengan konseptor Marwa, S.Pi., M.Si., Imanuel Gidion Pattipeilohy, S.Pi., M.Si. (BPBL Ambon);
 - iii. Rumput laut (*Eucheuma cottonii*) basah kelas konsumsi dengan konseptor Wiwien Mukti Andriyani, S.Pi., M.Si. (BBPBAP Jepara); dan
 - iv. Sarana pengemasan bibit rumput laut *kotoni* (*Kappaphycus alvarezii*) sistem kering tertutup dengan konseptor Slamet Mulyono, S.St.Pi. (BBPBL Lampung).

Tantangan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain:

- a. Terdapat perubahan atas hasil identifikasi SOP dan bisnis proses yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga mempengaruhi jumlah dan judul SOP yang harus disusun.
- b. Pelaksanaan pembahasan RSNi menyesuaikan dengan pembagian pelaksanaan jadwal pembahasan Direktorat lain lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya.

Rencana tindak lanjut triwulan II tahun 2026, yaitu: (1) Berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam pembahasan RSNI; (2) Pelaksanaan pembahasan SOP standardisasi bidang perikanan budi daya; (3) Penyiapan dan pelaksanaan kegiatan jejaring rumput laut; dan (4) Penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan CBIB bidang rumput laut.

3.2.2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut

3.2.2.1. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Rumput Laut

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup satker Direktorat Rumput Laut yang tindak lanjutnya dari Direktorat Rumput Laut telah tuntas berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Rumput Laut berdasarkan LHP (terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi baik bentuk surat) yang terbit pada tahun yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Rumput Laut yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 3.8. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut									
IKU: Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Rumput Laut									
Tahun 2025		Tahun 2026			% Capaian		% perbandingan dengan TW I Tahun 2025	Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi (persen)		Target (Persen)		Realisasi TW 1 (Persen)	Terhadap target TW 1 tahun 2026	Terhadap target tahun 2026		Target 2026	% Capaian 2026
TW I	Tahun 2025	Tahun 2026	TW 1						
85	89,19	86	86	92,31	107,34	107,34	108,6	86	107,34

Pada tahun 2026, capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Rumput Laut sebesar 92,31% atau 107,34% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 86%. Realisasi Direktorat Rumput Laut pada triwulan I tahun 2026 dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025 menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 108,6%.

Rencana aksi pada tahun 2026, yaitu Direktorat Rumput Laut melakukan penyelesaian hasil pengawasan dengan mengupayakan semua administrasi kegiatan agar bisa dilengkapi dengan tepat waktu serta akuntabel.

3.2.2.2. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Rumput Laut

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Rumput Laut merupakan indikator kinerja yang targetnya bersifat tahunan dan pencapaiannya dihitung di akhir tahun berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Jenderal dengan mekanisme berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN RB No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.9. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut										
IKU: Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Rumput Laut										
Tahun 2025		Tahun 2026			% Capaian		%	Renstra DJPB 2025-2029		
Realisasi		Target		Realisasi TW 1	Terhadap target TW 1 tahun 2026	Terhadap target tahun 2026		perbandingan dengan TW I Tahun 2025	Target 2026	% Capaian 2026
TW I	Tahun 2025	Tahun 2026	TW 1							
-	85,2	84,2	-	-	-	-	-	-	-	

Indikator kinerja ini pengukurannya bersifat tahunan, maka hasil penilaian belum dapat disajikan. Namun rencana aksi untuk triwulan berikutnya adalah memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk dapat memenuhi nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Rumput Laut.

3.2.2.3. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Rumput Laut

Indikator kinerja ini adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

- Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: (i) Pendidikan S-3 (Strata-Tiga); (ii) Pendidikan S-2 (Strata-Dua); (iii) Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat); (iv) Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga); (v) Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-1 (Diploma-Satu)/ SLTA Sederajat; dan (vi) Pendidikan di bawah SLTA. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen).

- b. Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: (i) Diklat Kepemimpinan; (ii) Diklat Fungsional; (iii) Diklat Teknis; dan (iv) Seminar/Workshop/Konferensi/Setara. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen).
- c. Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: (i) Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan (ii) Perilaku kerja. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen).
- d. Disiplin, diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: (i) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan (ii) Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Tabel 3.10. Indeks Profesional ASN Direktorat Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut										
IKU: Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Rumput Laut										
Tahun 2025		Tahun 2026			% Capaian		%	Renstra DJPB 2025-2029		
Realisasi		Target		Realisasi TW 1	Terhadap target TW 1 tahun 2026	Terhadap target tahun 2026		perbandingan dengan TW I Tahun 2025	Target 2026	% Capaian 2026
TW I	Tahun 2025	Tahun 2026	TW 1							
-	89,46	81,5	-	-	-	-	-	-	-	

Capaian IP ASN triwulan I tahun 2026 belum dapat dihitung karena indikator kinerja ini merupakan indikator bersifat semesteran, sehingga pencapaiannya belum dapat diukur. Namun, rencana aksi untuk triwulan berikutnya, diharapkan menghimbau kepada seluruh pegawai Direktorat Rumput Laut untuk meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikuti seminar, pelatihan secara luring maupun daring.

3.2.2.4. Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Rumput Laut

Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dalam kegiatan ini akan dilakukan audit kearsipan yang merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Kearsipan sendiri adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tabel 3.11. Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut									
IKU: Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Rumput Laut									
Tahun 2025		Tahun 2026			% Capaian		% perbandingan dengan TW I Tahun 2025	Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi		Target		Realisasi TW 1	Terhadap target TW 1 tahun 2026	Terhadap target tahun 2026		Target 2026	% Capaian 2026
TW I	Tahun 2025	Tahun 2026	TW 1						
-	73,52	81	-	-	-	-	-	-	-

Capaian indikator kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Rumput Laut pada triwulan I tahun 2026 belum dapat diukur karena indikator ini bersifat tahunan, sehingga belum dapat dijadikan pembanding atas keberhasilan pada tahun sebelumnya. Namun demikian, agar target kegiatan ini tercapai di akhir tahun, Direktorat Rumput Laut berupaya untuk memenuhi hal-hal yang menjadi tolok ukur dalam penilaiannya.

3.2.2.5. Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut

Persentase layanan perkantoran Direktorat Rumput Laut adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya perlu dilaksanakan karena indikator kinerja ini merupakan ukuran atas pelaksanaan layanan perkantoran yang meliputi pelayanan jasa dan administrasi yang dilaksanakan di Direktorat Rumput Laut.

Tabel 3.12. Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut										
IKU: Layanan perkantoran Direktorat Rumput Laut										
Tahun 2025		Tahun 2026			% Capaian		%	Renstra DJPB 2025-2029		
Realisasi (persen)		Target (persen)		Realisasi TW 1 (persen)	Terhadap target TW 1 tahun 2026	Terhadap target tahun 2026		perbandingan dengan TW I Tahun 2025	Target 2026	% Capaian 2026
TW I	Tahun 2025	Tahun 2026	TW 1							
100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	

Capaian indikator kegiatan layanan perkantoran tahun 2025 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator ini merupakan hasil kerja Direktorat Rumput Laut terutama terkait pelayanan perkantoran seperti pelayanan

persuratan, layanan rapat, keuangan dan kepegawaian yang dilaksanakan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2025, capaian tahun 2026 sama dengan capaian tahun 2025. Rencana aksi pada triwulan II adalah mempertahankan hasil maksimal untuk capaian pada triwulan II.

3.2.2.6. Penyelesaian SOP Direktorat Rumput Laut

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Penyelesaian SOP Direktorat Rumput Laut adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya berdasarkan pada pelaksanaan penyelesaian identifikasi SOP oleh Direktorat Rumput laut.

Tabel 3.13. Penyelesaian SOP Direktorat Rumput Laut Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut									
IKU: Penyelesaian SOP Direktorat Rumput Laut									
Tahun 2025		Tahun 2026			% Capaian		% perbandingan dengan TW I Tahun 2025	Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi (persen)		Target(persen)		Realisasi TW 1 (persen)	Terhadap target TW 1 tahun 2026	Terhadap target tahun 2026		Target 2026	% Capaian 2026
TW I	Tahun 2025	Tahun 2026	TW 1						
-	100	100	-	-	-	-	-	-	-

Capaian indikator kegiatan Penyelesaian SOP Direktorat Rumput Laut merupakan indikator kinerja yang periode pengukurannya tahunan, sehingga capaian pada triwulan belum dapat diukur. Rencana aksi yang dilakukan adalah menyelesaikan SOP yang telah diidentifikasi pada tahun 2025.

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Rumput Laut triwulan I tahun 2026 secara umum menunjukkan capaian positif dan akuntabel, tercermin dari nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 112,20.
2. Indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja manajerial (IKM) yang periode perhitungannya triwulanan telah mencapai target, yaitu (1) Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat; (2) Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Rumput Laut; dan (3) IKU layanan perkantoran.
3. Hal tersebut mengindikasikan efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung agenda pembangunan subsektor budi daya rumput laut, serta kontribusi terhadap pencapaian target prioritas nasional dan Renstra DJPB 2025-2029.
4. Kendala struktural dan administratif masih dijumpai meskipun tidak menghambat output utama kinerja Direktorat Rumput Laut, seperti proses administrasi dan pengadaan barang dan jasa, perlunya penyesuaian spesifikasi teknis bantuan dengan kondisi lokasi penerima, efisiensi anggaran, dan sebagainya.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Direktorat Rumput Laut triwulan I tahun 2026 sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempertahankan capaian terhadap target indikator kinerja yang sudah tercapai dengan melakukan monitoring dan pendokumentasian yang baik.
2. Melakukan pemantauan dan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB dan Program DJPB secara rutin.
3. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder untuk memperkuat aspek akuntabilitas dan keberlanjutan program.
4. Melakukan penyesuaian kegiatan apabila terjadi perubahan alokasi anggaran dan target kegiatan.